



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUMAS
PURWOKERTO
2020**

PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas 2020-2024.


Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin serta kerja keras dari seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang.

Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu



Purwokerto, Januari 2021
Kepala,


Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag.
NIP. 196403221992031002

RINGKASAN EKSKUTIF

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja setiap tahun.

Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengacu pada visi Kementerian Agama RI yaitu **“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”** dengan misi yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas Amoderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mendukung 11

Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menetapkan 54 sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai.

Sasaran strategis dari tujuan ini yaitu Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Adapun sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

a. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Adapun sasaran programnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama
- 2) Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama
- 3) Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama
- 4) Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

b. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya dengan sasaran program yaitu menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama

3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama dengan sasaran program sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan
 - 2) Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel
 - b. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran dengan sasaran program Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa.
 - b. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan dengan sasaran program meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.
 - c. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dengan sasaran program :
 - 1). Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - 2). Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP.
 - d. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan dengan sasaran program Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
 - e. Meningkatnya kualitas mental /karakter siswa dengan sasaran program yaitu menguatnya pendidikan karakter siswa
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan sasaran program Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2020. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak dua belas sasaran strategis telah tercapai, Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang menggambarkan peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

Realisasi pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang tercapai 100%, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 4 Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama
 - b. Prosentase penyuluh agama yang dibina
 - c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan
2. Sasaran 2 : Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama yang tercapai 100%, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 4 Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Menurunnya frekwensi isu-isu kerukunan umat beragama
 - b. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama
 - c. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama
 - d. Menguatnya sistem pendidikan yang berprspektif moderat
3. Sasaran 3 : Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 3 Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;

- b. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);
 - c. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya)
4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 8 Indikator Kinerja yaitu :
- a. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga.
 - d. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus
 - e. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji
 - f. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji
 - g. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji.
 - h. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.
5. Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 2 Indikator Kinerja yaitu :
- a. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat
 - b. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf
6. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 3 Indikator Kinerja yaitu :
- a. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif ;

- b. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan ;
 - c. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran .
7. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 4 Indikator Kinerja yaitu :
- a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
 - b. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
 - c. Meningkatnya kualitas penanganan ATS
 - d. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah
8. Sasaran 8 : Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 3 Indikator Kinerja yaitu :
- a. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal ;
 - c. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik.
9. Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 2 Indikator Kinerja yaitu :
- a. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi;
 - b. Meningkatnya budaya mutu pendidikan
10. Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas mental /karakter siswa, Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 3 indikator Kinerja yaitu :
- a. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan;
 - b. Meningkatnya kepeloporan dan sukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan;
 - c. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai.

11. Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian 14 indikator kinerja yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum;
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
- c. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan ;
- d. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel;
- e. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi;
- f. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;
- g. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;
- h. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran;
- i. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor
- j. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;
- k. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga;
- l. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi;
- m. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi;
- n. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Kedudukan	3
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Aspek Organisasi	6
F. Potensi dan Permasalahan	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
A. Target Kinerja	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja	28
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	37

Lampiran-Lampiran

1. Penetapan Kinerja Tahun 2020
2. Capaian Kinerja Tahun 2020
3. Perjanjian Kinerja 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Usulan pembentukan Departemen Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Departemen Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri".

Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama.

Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta

diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus. Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama.

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Berangkat dari uraian tersebut maka di Karesidenan Banyumas juga didirikan Kantor Urusan Agama Karesidenan Banyumas yang bertempat di Purwokerto. Sesuai dengan perkembangannya di tiap kabupaten pun dibentuk pula, berproses terus akhirnya bernama Kantor Departemen Agama Kabupaten termasuk Kandepag Kabupaten Banyumas.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, kemudian diikuti oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama tertanggal 28 Januari 2010, maka sejak saat itu penyebutan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas berubah menjadi **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas**.

Saat ini di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ada 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, 5 (lima) Seksi (Seksi Bimas Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi PAIS), 3 (tiga) Penyelenggara (Penyelenggara Syariah, Penyelenggara Bimas Kristen dan Penyelenggara Bimas Katolik), 27 KUA Kecamatan, 3 MIN, 3 MTsN dan 3 MAN serta ratusan RA/BA dan madrasah swasta serta lembaga pendidikan keagamaan.

Berikut ini adalah nama pejabat (Kepala Kantor) Departemen Agama/ Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sejak 1971 hingga sekarang, yaitu :

1. H. Djuweni (1971 – 1976)
2. KH Syamsuri Ridwan (1976 – 1979)
3. H. AK. Ansori (1979 – 1985)

4. HM. Sugito (1985 – 1990)
5. Drs. H. Abbas Rosyadi (1990 – 1996)
6. Drs. H. Mursyid (1996 – 1999)
7. Drs. H. Ahya Ulumuddin, SH. (1999 – 2003)
8. Drs. H. Atabik Yusuf Zuhdi (2003 – 2006)
9. Drs. H. Mughni Labib, MSI (2006 –2008)
10. Drs. H. Mawardi SH., MH. (2008 – 2010)
11. Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I (2010 – 2017)
12. Drs. H. Mughni Labib MSI. (Maret - September 2017)
13. Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I (Januari 2018 – Desember 2019)
14. Drs. H. Akhsin Aedi M.Ag. (April 2020 – Sekarang)

B. Kedudukan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah satu Instansi Vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor No. 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai salah satu institusi pemerintah antara lain juga menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran) serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah salah satu Instansi Vertikal (eselon III) yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas;
- b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor No. 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama , Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas terdiri atas :

- 1) Subbag Tata Usaha;
- 2) Seksi Pendidikan Madrasah;
- 3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- 4) Seksi Pendidikan Agama Islam;
- 5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- 7) Penyelenggara Syariah;
- 8) Penyelenggara Bimas Kristen
- 9) Penyelenggara Bimas Katolik dan
- 10)Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan organisasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas didukung oleh 27 KUA Kecamatan, 3 MIN, 3 MTsN, 3 MAN dan Madrasah swasta serta lembaga pendidikan keagamaan dengan jumlah Pegawai baik guru maupun karyawan sejumlah 1.416 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu :

JUMLAH PNS BERDASARKAN AGAMA DAN JENIU KELAMIN

NO	AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Islam	550	852	1402
2	Kristen	1	-	1
3	Katolik	2	5	7
4	Hindu	1	1	2
5	Budha	2	2	4
JUMLAH		556	860	1.416

JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I	3	3	6
2	II	62	47	109
3	III	376	721	1.097
4	IV	115	89	204
Jumlah		556	860	1.416

JUMLAH PNS BERDASARKAN SATKER DAN PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	≤ SLTA	Diploma	S1	≥ S2	JUMLAH
1	Subbag TU	7	5	16	6	34
2	Pendidika Islam	31	56	1.039	58	1.184
3	Bimas Islam	80	16	73	9	178
4	Bimas Kristen	-	-	1	-	1
5	Bimas Katolik	1	1	4	-	6
6	Bimas Hindu	-	-	2	-	2
7	Bimas Budha	-	-	3	1	4
8	Gara Haji dan Umroh	1	1	5	-	7
JUMLAH		120	79	1.143	74	1.416

E. Aspek Strategis Organisasi

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan dan program Kementerian Agama RI, dituangkan dalam 8 Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a) Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN);
- b) Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c) Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d) Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- e) Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- f) Pembinaan Administrasi Umum; dan
- g) Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan peningkatan pelayanan agama,

Ada 1 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a) Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;

3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam;

- c. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;
- d. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

4. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung system informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Pembinaan Haji dan Umrah;
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

5. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- c. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;

7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama katolik
- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik; dan
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik;

8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu.

Ada 1 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu.

9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada 1 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Progra Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha.

F. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama tahun 2020, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan program kerja tahun 2020.

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan tujuh bidang yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan .

1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain:

- a. Pengalaman panjang umat beragama di Banyumas dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada.
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain:

- a. Adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat.

Namun, disisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba yang juga tidak berkurang intensitasnya.

- b. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional, sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama.

2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, antara lain:

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.
- b. Telah terbentuk Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Banyumas
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.
- d. Keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain:

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput.
- b. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural-formal daripada pendekatan

kultural-informal yang lebih mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

- c. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk).
- d. Dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama.
- e. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
- f. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum.
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang / dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

- a. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai.
- b. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparaturnya penyedia pelayanan,

seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS dan honorer maupun unsur pemuka dan tokoh agama, serta penghulu.

- c. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum cukup memadai.
- d. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan.
- e. Terkait agama Khonghucu, belum akuratnya data jumlah Umat Agama Khonghucu, jumlah rohaniwan agama Khonghucu, dan jumlah penyuluh agama, yang mengakibatkan pelayanan keagamaan Umat Khonghucu belum optimal.

4. Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Sejumlah potensi yang ditengarai dapat mendukung upaya pengembangan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

- a. Tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dan melakukan wisata keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya.
- b. Tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- c. Berkembangnya lembaga-lembaga pengelola potensi ekonomi keagamaan seperti BAZ, LAZ dan BWI.
- d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang berperan sebagai mitra strategis Pemerintah.
- e. Potensi zakat yang cukup tinggi masih dapat terus ditingkatkan.
- f. Sebagian lembaga sosial keagamaan telah menunjukkan kinerja, profesionalisme dan integritas yang tinggi. Lembaga tersebut dapat dijadikan model bagi upaya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang lebih luas.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

- a. Masih berkembang persepsi keliru bahwa fungsi dana dan aset sosial keagamaan itu hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan

penganut agama bersangkutan. Sumber-sumber ekonomi keagamaan itu belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat secara lintas agama.

- b. Masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa zakat bukan hanya berupa zakat fitrah namun juga zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap penghasilan, investasi, kegiatan produktif lain seperti jual-beli dan sewa-menyewa.
 - c. Masih ada kecurigaan di kalangan sebagian masyarakat terhadap usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber ekonomi keagamaan;
 - d. Dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional. Diperlukan perhatian dan dukungan yang sungguh sungguh dari semua pihak, terutama pemerintah, agar potensi ekonomi keagamaan dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional.
 - e. Belum tersedianya atau belum termutakhirkannya database lembaga sosial keagamaan yang mengandung informasi yang cukup terperinci mengenai profil dari lembaga sosial keagamaan berikut rekam jejak kiprah mereka dalam fokus bidang yang menjadi garapan mereka.
5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- Sejumlah potensi** yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:
- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji.
 - b. Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, sehingga lebih bermanfaat bagi jemaah haji dan kesejahteraan umat.
 - c. Tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang direpresentasikan melalui berkembangnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Di samping itu juga terdapat peran serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah.

- d. Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji.
- e. Meningkatnya kapasitas ekonomi sebagian umat turut meningkatkan minat dan kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah.

Ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan dari anggaran BPIH sangat bergantung waktu disahkannya anggaran BPIH oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga jika penetapan BPIH oleh Presiden mengalami keterlambatan maka semua kegiatan operasional haji lainnya menjadi semakin pendek masa waktunya.
 - b. Profil jamaah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya.
 - c. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pemerintah Arab Saudi melalui Ta'limatul Hajj seringkali berubah-ubah.
 - d. Perbedaan kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat, dan bahasa merupakan kendala tersendiri bagi petugas haji.
 - e. Belum semua lembaga penyelenggara umrah terbina dan terawasi dengan baik sehingga masih menimbulkan resiko penyelenggaraan umrah yang kurang aman dan nyaman.
6. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- a. Pendidikan Umum Berciri Agama
Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain:
 - 1) Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA dan madrasah;
 - 2) Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum;

3) Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan pendidikan pada sekolah umum;

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain adalah:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA dan madrasah yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standarisasi pelayanan pendidikan umum berciri agama;
- 2) Sebaran madrasah masih sangat terkonsentrasi pada beberapa kecamatan sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang membutuhkan;
- 3) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
- 4) Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;
- 5) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;

b. Pendidikan Keagamaan

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan antara lain:

- 1) Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
- 2) Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- 3) Sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain:

- 1) Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standarisasi pendidikan keagamaan akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta;

- 2) Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan;
- 3) Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;
- 4) Masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan;
- 5) Masih belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan;
- 6) Masih terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan pelebagaan pendidikan keagamaan; dan
- 7) Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan;
- 8) Pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini hampir seluruhnya berupa pendidikan non formal. Pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan non formal ini tidak efektif menghasilkan ahli agama. Berdasarkan pengalaman tersebut maka perlu dirintis pendidikan keagamaan formal; dan
- 9) Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu, belum adanya kurikulum terstandar, masih terbatasnya jumlah guru agama Khonghucu, masih belum tersedianya standarisasi kompetensi guru agama Khonghucu, serta belum tersedianya data yang lengkap mengenai jumlah siswa dan guru agama, serta lembaga pendidikan agama Khonghucu di Banyumas.

c. Pendidikan Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, antara lain:

- 1) Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;

- 2) Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.

Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum antara lain:

- 1) Kebutuhan akan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi;
- 2) Peserta didik pada satuan pendidikan umum beberapa umat beragama seperti Hindu, Buddha dan Khonghucu, belum cukup tersentuh kurikulum dan penyediaan buku pelajaran agama yang memadai. Siswa agama tersebut tidak semua dapat terlayani sehingga harus mengikuti pelajaran agama yang diselenggarakan oleh lembaga peribadatan sesuai agama bersangkutan.
- 3) Belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- 4) Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;
- 5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- 6) Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- 7) Masih kurangnya jumlah Pengawas PAI serta Pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya;
- 8) Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan
- 9) Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.

7. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Agama ialah:

- a. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan;
- b. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama;
- c. Sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program;
- d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;
- e. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama, antara lain:

- a. Kapasitas dan profesionalisme sebagian aparatur masih rendah;
- b. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;
- c. Kesulitan koordinasi, pengendalian dan pengawasan akibat struktur organisasi yang besar dan jangkauan geografis yang luas;
- d. Berbagai tantangan sosial dan budaya yang dihadapi terkait proses *recovery aset*;
- e. Belum tersedianya data dasar keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dalam format formulir yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja organisasi, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja yang bersifat outcome.

Perjanjian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2020 yang telah ditandatangani baru pada target capaian output. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2020 telah menetapkan target kinerja berupa indikator output dan besaran target output-nya yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur adalah indikator kinerja input (rencana/anggaran keuangan) dan output.

A. Target Kinerja

Target Kinerja Kantor Kementerian Agama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SEKRETARIAT JENDERAL			
1.	Meningkatnya kualitas Kualitas administrasi keuangan dan barang milik negara (BMN)	➤ Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	12 Dokumen
2.	Meningkatnya Kualitas Adminis trasi Umum	➤ Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
3.	Meningkatnya mutu kesadaran kerukunan umat ber agama	➤ Jumlah paket bantuan operasional Sekber FKUB	1 Lokasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	<ul style="list-style-type: none"> ➤Jumlah penghulu yang terbina ➤Jumlah KUA yang memenuhi standar minimal ➤Jumlah keluarga sakinah yang terbina ➤Jumlah peserta bimbingan perkawinan pra nikah ➤Jumlah pengadaan sarana dan prasarana KUA 	<p>40 Orang</p> <p>27 Lokasi</p> <p>1 Pasangan</p> <p>400 Pasang</p> <p>2 Unit</p>
2.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf	<ul style="list-style-type: none"> ➤Jumlah lembaga yang mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat ➤Jumlah bantuan bantuan pengamanan aset wakaf (papanisasi harta benda wakaf) ➤Jumlah lembaga wakaf yang menerima bantuan sertifikasi 	<p>15 Lembaga</p> <p>1 paket</p> <p>1 Lokasi</p>
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> ➤Jumlah penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan ➤Jumlah penyuluh Agama Islam yang berkualitas ➤Jumlah kegiatan penyelenggaraan MTQ ➤Jumlah kegiatan pendataan dan verifikasi lembaga seni dan siaran keagamaan Islam 	<p>218 Orang</p> <p>50 Orang</p> <p>2 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p>
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah	Jumlah direktori Pustaka Islam	1 Unit
5.	Terlaksananya Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Islam yang tepat waktu	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PENDIDIKAN ISLAM			
1.	Meningkatnya mutu dan relevansi Pendidikan Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah dokumen penyelenggaraan UASBN PAI ➤ Jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi ➤ Jumlah Guru PAI PNS yang menerima TPG 	<p>1 Dokumen</p> <p>79 Guru</p> <p>472 Guru</p>
2.	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Ustad Pendidikan Keagamaan Islam yang menerima intensif 	13 Orang
3.	Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan Pondok Pesantren	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah santri Ula penerima BOS ➤ Jumlah Santri Wustho penerima BOS ➤ Jumlah santri PPS Ula penerima PIP ➤ Jumlah santri PPS Wustho penerima PIP ➤ Jumlah santri PPS Ulya penerima PIP 	<p>100 santri</p> <p>480 santri</p> <p>180 santri</p> <p>286 santri</p> <p>178 santri</p>
4.	Meningkatnya mutu siswa madrasah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Siswa MI Penerima BOS ➤ Siswa MTs penerima BOS ➤ Siswa MA penerima BOS ➤ Jumlah siswa RA/BA penerima BOP 	<p>33.115 siswa</p> <p>14.824 siswa</p> <p>2.738siswa</p> <p>6.722 siswa</p>
5.	Meningkatnya jaminan kualitas kelembagaan madrasah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah layanan dukungan manajemen 	1 Layanan
6.	Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah guru Non PNS penerima insentif 	1.028 guru

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I	1 layanan
8.	Meningkatnya kualitas kinerja pegawai dan operasional perkantoran	Jumlah layanan perkantoran pembayaran gaji dan tunjangan	1 Layanan
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN			
1.	Meningkatnya kualitas peserta didik dan pendidikan Agama Kristen tingkat dasar dan menengah	Jumlah siswa SMTK yang menerima KIP	9 Siswa
		Jumlah siswa SMTK yang menerima BOS	9 siswa
2.	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik agama dan keagamaan Kristen	Jumlah guru PAK Non PNS penerima tunjangan profesi	2 Orang
		Jumlah guru PAK Non PNS penerima insentif	8 Orang
3.	Meningkatnya kualitas tenaga penyuluh Agama Non PNS	Jumlah penyuluh Agama Kristen yang menerima Tunjangan	13 Orang
4.	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
5.	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen	Jumlah guru PNS yang dibayarkan tunjangan profesinya	15 Orang
		Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK			
1.	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Katolik	Jumlah guru pendidikan Agama Katolik Non PNS yang menerima tunjangan Profesi	2 orang
		Jumlah guru Agama Katolik yang meningkatkan Kompetensinya	4 Orang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama katolik	➤ Jumlah penerima bantuan KKG pendidikan Agama Katolik	1 lokasi
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik	➤ Jumlah penyuluh Agama Katolik Non PNS yang menerima tunjangan	6 Orang
4.	Terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan guru PNS	1 Layanan
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU			
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perkantoran pendidikan Bimas Hindu	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA			
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Budha	Jumlah guru Agama Non PNS penerima TPG	2 Orang
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perkantoran pendidikan Bimas Budha	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	1 layanan
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH			
1.	Meningkatnya kualitas layanan dokumen dan perlengkapan jamaah haji	➤ Jumlah paspor yang divisa ➤ Jumlah dokumen layanan transportasi haji ➤ Jumlah dokumen pendaftaran dan pembatalan haji reguler	1000 orang 1 Dokumen 1 Dokumen

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Tersedianya petugas haji yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah petugas haji yang profesional ➤ Jumlah jamaah haji yang dibimbing 	15 orang 75 orang
3.	Tersedianya dukungan layanan manajemen dan operasional penyelenggaraan haji dan umroh	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah layanan perkantoran 	1 Layanan

Penetapan kinerja berdasarkan dana DIPA yang tersedia pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
A. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		
1.	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-
2.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-
3.	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	33.698.326.000
4.	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-
5.	Pembinaan Administrasi Perencanaan	-
5.	Pembinaan Administrasi Umum	811.164.000
7.	Pembinaan administrasi informasi keagamaan dan kehumasan	-
B. Kerukunan Umat Beragama		
1.	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	40.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
C. Bimbingan Masyarakat Islam		
1.	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2.147.250.000
2.	Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf	7.900.000
3.	Pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam	1.816.000.000
4.	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.	2.000.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	21.184.344.000
D. Pendidikan Islam		
1.	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	23.156.475.000
2.	Peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan keagamaan Islam	1.130.500.000
3.	Peningkatan akses, mutu dan relevansi madrasah	54.255.100.000
4.	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan madrasah	52.260.957.000
5.	Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam	69.475.142.000
E. Bimbingan Masyarakat Kristen		
1.	Pengelolaan dan pembinaan pendidikan Agama kristen	105.600.000
2.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	78.000.000
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen	158.886.000
4.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen	656.744.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
F. Bimbingan Masyarakat Katolik		
1.	Pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik	82.900.000
2.	Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Katolik	42.000.000
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik	185.369.000
4.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik	592.443.000
G. Bimbingan Masyarakat Hindu		
1.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu	259.681.000
G. Bimbingan Masyarakat Buddha		
1.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	73.344.000
2.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Budha	549.468.000
H. Penyelenggaraan haji dan Umroh		
1.	Pelayanan haji dalam negeri	183.000.000
2.	Pembinaan haji	149.250.000
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umroh	869.200.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2020 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan mengacu pada IKU Kementerian Agama.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2020 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran strategis pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dilakukan secara keseluruhan,

dihitung berdasarkan jumlah Indikator kinerja yang tercapai dibagi dengan jumlah Indikator kinerja yang ditargetkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL				
1.	Nilai kualitas dan kuantitas dukungan layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
2.	➤ Jumlah dokumen layanan manajemen SDM	1 Layanan	1 Layanan	100 %
3.	➤ Jumlah dokumen layanan manajemen keuangan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	➤ Jumlah Laporan keuangan dan BMN	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	➤ Prosentase gaji yang terbayar	100 %	100 %	100 %
4.	Dokumen rencana kerja dan anggaran	1 Dok	1 Dok	100 %
5.	➤ Tersedianya sarana prasarana PTSP	1 set	1 set	100 %
	➤ Tersedianya fasilitas per kantoran	1 Unit	1 Unit	100 %
	➤ Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan layanan	12 Bulan Layanan	100 %
6.	Jumlah layanan hubungan masyarakat dan komunikasi	1 Layanan	1 Layanan	100 %
9.	➤ Jumlah dialog lintas agama	1 Dialog	1 Keg	100 %
	➤ Jumlah paket bantuan operasional Sekber FKUB	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
BIMAS ISLAM				
1.	Jumlah penghulu yang terbina	7 Orang	36 Orang	514 %
2.	Jumlah KUA yang memenuhi standar minimal	12 KUA	27 KUA	225 %
3.	Jumlah pelaksanaan MBK dan KTI	1 Keg	1 Keg	100 %
4.	Jumlah peserta bimbingan perkawinan pra nikah	1.326 Org	1.326 Orang	100 %
5.	Jumlah pembinaan lembaga zakat dan wakaf	1 paket	1 paket	100 %
6.	Jumlah bantuan operasional BWI	1 lembaga	1 lembaga	100 %
7.	Jumlah bantuan operasional Baznas	1 Lembaga	1 lembaga	100 %
8.	Jumlah penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan	218 orang	218 orang	100 %
9.	Jumlah penyuluh Agama Islam yang berkualitas	100 orang	240 orang	240 %
10.	Jumlah penyelenggaraan MTQ	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
11.	Jumlah paket bantuan Ormas keagamaan dan majelis taklim	5 Lembaga	5 Lembaga	100 %
12.	Jumlah pelayanan hisab rukyat	3 kali	3 kali	100 %
13.	Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan	12 bulan	100 %
PENDIDIKAN ISLAM				
1.	Jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan	40 Siswa	40 Siswa	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Jumlah dokumen penye lenggaraan UASBN PAI	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.	Jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi	78 guru	78 guru	100 %
4.	Jumlah kegiatan pengiriman kontingen pentas PAI	1 Keg	1 Keg	100 %
5.	Jumlah bantuan pember dayaan MGMP	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
6.	Jumlah kegiatan Ngobrol Pendidikan Agama Islam	1 Keg	1 Keg	100 %
7.	Jumlah Pembayaran TPG PNS PAI	12 Bulan	12 Bulan	100 %
8.	Jumlah dokumen layanan pendidikan keagamaan Islam	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
9.	Jumlah dokumen penyeleng garaan ujian pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
10.	Jumlah santri Ula penerima BOS	117 santri	117 santri	100 %
11.	Jumlah Santri Wustho penerima BOS	492 santri	492 santri	100 %
12.	Jumlah pendidik pada lembaga pendidikan keaga maan Islam penerima insentif	12 Orang	12 Orang	100 %
13.	Jumlah Madin dan lembaga Pendidikan Al Qur'an peneri ma BOP	15 Lembaga	15 Lembaga	100 %
14	Jumlah santri ula penerima bantuan PIP	199 santri	199 santri	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
15	Jumlah Santri Wustho penerima bantuan PIP	368 santi	368 santi	100 %
16	Jumlah santri ulya penerima bantuan PIP	187 santri	187 santri	100 %
17.	Jumlah siswa Madrasah dan RA yang berdaya saing	100 siswa	100 Siswa	100 %
18.	Jumlah dokumen BOS, PIP dan BOP madrasah dan RA/BA	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
19.	Jumlah dokumen standar Nasional Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
20.	Siswa MI Penerima BOS	34.075 siswa	34.075 siswa	100 %
21.	Siswa MTs penerima BOS	14.828 siswa	14.824 siswa	99.97 %
	Siswa MA penerima BOS	2.808 siswa	2.738 siswa	97.50 %
22.	Jumlah siswa RA/BA penerima BOP	6.637 siswa	6.315 siswa	95.15 %
23.	Jumlah dokumen layanan manajemen pendidikan madrasah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
24.	Jumlah guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi	756 Guru	756 Guru	100 %
25.	Jumlah guru Non PNS penerima tunjangan profesi	738 Guru	738 Guru	100 %
26.	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	2 layanan	2 layanan	100 %
27.	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
28.	Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN				
1.	Jumlah siswa SMTK yang menerima KIP	18 Siswa	11 Siswa	61.11 %
2.	Jumlah siswa SMTK yang menerima BOS	18 siswa	11 siswa	61.11 %
3.	Jumlah guru PAK Non PNS penerima tunjangan profesi	2 Orang	2 Orang	100 %
4.	Jumlah guru PAK Non PNS penerima Tunjangan fungsio nal	17 Orang	17 Orang	100 %
5.	Jumlah pengadaan Laptop dan Printer	1 Set	1 Set	100 %
6.	Jumlah bantuan KKG SD	1 Unit	1 unit	100 %
7.	Jumlah sekolah yang menda pat bantuan sarpras	1 Unit	1 unit	100%
8.	Jumlah bantuan sarpras rumah ibadah	1 unit	1 Unit	100 %
9.	Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100 %
10.	Jumlah operasional perkan toran	12 Bulan	12 Bulan	100 %
11.	Jumlah layanan pembayar an tunjangan profesi	15 guru	15 guru	100 %
12.	Jumlah operasional dan pemeliharaan perkantoran	12 bulan	12 bulan	100 %
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK				
1.	Jumlah guru pendidikan Agama Katolik Non PNS yang menerima tunjangan profesi	1 orang	1 orang	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Jumlah bantuan KKG/ MGMP Katolik	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %
3.	Jumlah dukungan layanan bidang pendidikan Katolik	1 layanan	1 layanan	100 %
4.	Jumlah keluarga Katolik yang memperoleh bimbingan keluarga Bahagia	20 Keluarga	20 Keluarga	100 %
5.	Jumlah penyuluh Agama Katolik PNS yang menerima tunjangan	6 Orang	6 Orang	100 %
6.	Jumlah layanan perkantoran (pembayaran gaji pegawai dan operasional kantor)	12 Bulan	12 Bulan	100 %
7.	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan guru PNS	12 Bulan	12 Bulan	100 %
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU				
1.	Jumlah layanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan)	12 bulan	1 Tahun	100 %
2.	Jumlah dokumen operasional dan pemeliharaan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100 %
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA				
1.	Jumlah guru agama Non PNS yang menerima TPG	2 orang	2 orang	100 %
2.	Jumlah layanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan)	12 bulan	12 bulan	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH				
1.	Jumlah paspor yang divisa	1000 orang	1.238 orang	123.80 %
2.	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji	6 orang	6 Orang	100 %
3.	Jumlah PLHUT yang dibangun	1 Paket	1 Paket	100 %
4.	Jumlah petugas haji yang profesional	15 Orang	20 orang	133.33 %
5.	Jumlah jamaah haji yang dibimbing	75 Orang	75 Orang	100 %
6.	Jumlah layanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan)	12 bulan	12 bulan	100 %
7.	Jumlah kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	12 bulan	12 bulan	100 %

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak luput dari dukungan anggaran. Anggaran Kementerian Agama bersumber dari APBN, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama	4.509.490.000	5.006.178.000	4.973.328.039	99.34 %
2	Program Bimbingan Masyarakat Islam	21.454.224.000	24.733.113.000	23.728.454.299	95.94 %

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
3	Program Pendidikan Islam	200.278.174.000	196.171.994.000	196.165.545.435	100 %
4	Program Bimbingan Masyarakat kristen	999.230.000	935.476.000	902.872.539	96.51 %
5	Program Bimbingan Masyarakat katolik	902.712.000	857.822.000	792.472.956	92.38 %
6	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	259.681.000	234.373.000	233.124.325	99.47 %
7	Program bimbingan Masyarakat Budha	622.812.000	650.603.000	645.844.959	99.27 %
8	Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh	2.685.600.000	1.140.549.000	1.139.017.968	99.87 %
JUMLAH TOTAL		231.711.923.000	229.730.108.000	228.580.560.520	99.50 %

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai (51)	173.229.956.000	172.269.389.948	99,45%
2	Belanja Barang (52)	55.842.607.000	55.660.225.572	99,67%
3	Belanja Modal (53)	175.045.000	174.945.000	99,94%
4	Belanja Bantuan Sosial (57)	482.500.000	476.000.000	98,65%
Jumlah		229.730.108.000	228.580.560.520	99,50%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama. Secara keseluruhan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam tahun 2019 telah mencapai target. Dari beberapa indikator kinerja rata rata tercapai 100%


Beberapa masalah yang perlu menjadi catatan khusus dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya diantaranya adalah :

- Perencanaan anggaran masih mempunyai beberapa titik kelemahan yang berakibat pada perlunya revisi secara berulang-ulang. Diantara titik lemah tersebut adalah keterbatasan anggaran serta regulasi peraturan yang cepat berubah dan berulang sehingga memerlukan revisi anggaran.
- Banyaknya usulan program dan kegiatan yang bersifat urgen dan mendesak akan tetapi tidak terakomodir pada DIPA tahun 2020 sehingga program tidak dapat berjalan secara menyeluruh sesuai yang diharapkan.
- Jumlah nominal alokasi anggaran pada beberapa kegiatan sangat minim sehingga program tidak dapat berjalan secara maksimal.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.



Banyumas, Januari 2021
Kepala,


Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag.
NIP. 196403221992031002

**PENETAPAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
A.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama				
1.	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan BMN	➤ Jumlah dokumen layanan manajemen keuangan dan BMN	1 layanan	3.698.326.000
2.	Pembinaan Administrasi Umum	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran	Terlaksananya layanan operasional dan pemeliharaan Kantor	1 layanan	811.164.000
B.	Program Kerukunan Umat Beragama				
1.	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Meningkatnya mutu kesadaran kerukunan umat beragama	➤ Jumlah paket bantuan operasional Sekber FKUB	1 Lokasi	40.000.000
C.	Program Bimas Islam				
	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah penghulu yang terbina ➤ Jumlah KUA yang memenuhi standar minimal ➤ Jumlah keluarga sakinah yang terbina ➤ Jumlah peserta bimbingan perkawinan pra nikah ➤ Jumlah pengadaan sarana dan prasarana KUA 	40 Orang 27 Lokasi 1 Pasangan 400 Pasang 2 Unit	8.000.000 1.947.750.000 21.000.000 130.500.000 40.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.	Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf	<ul style="list-style-type: none"> ➤Jumlah lembaga yang mendapat kan pembinaan manajemen ekonomi umat ➤Jumlah bantuan bantuan pengamanan aset wakaf (papanisasi harta benda wakaf) ➤Jumlah lembaga wakaf yang menerima bantuan sertifikasi 	<p>15 Lembaga</p> <p>1 paket</p> <p>1 Lokasi</p>	<p>2.400.000</p> <p>3.000.000</p> <p>2.500.000</p>
3.	Pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> ➤Jumlah penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan ➤Jumlah penyuluh Agama Islam yang berkualitas ➤Jumlah kegiatan penyelenggaraan MTQ ➤Jumlah kegiatan pendataan dan verifikasi lembaga seni dan siaran keagamaan Islam 	<p>218 Orang</p> <p>50 Orang</p> <p>2 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p>	<p>1.744.000.000</p> <p>53.000.000</p> <p>17.000.000</p> <p>2.000.000</p>
4.	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.	Meningkatnya kualitas pengelolaan urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah	Jumlah direktori Pustaka Islam	1 Unit	2.000.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Islam yang tepat waktu	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	21.184.344.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
D.	Program Pendidikan Islam				
1.	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	Meningkatnya mutu dan relevansi Pendidikan Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah dokumen penyelenggaraan UASBN PAI ➤ Jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi ➤ Jumlah Guru PAI PNS yang menerima TPG 	<p>1 Dokumen</p> <p>79 Guru</p> <p>472 Guru</p>	<p>2.500.000</p> <p>1.718.405.000</p> <p>21.435.570.000</p>
2.	Peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan keagamaan Islam	<p>Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren</p> <p>Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Ustad Pendidikan Keagamaan Islam yang menerima intensif ➤ Jumlah santri Ula penerima BOS ➤ Jumlah Santri Wustho penerima BOS ➤ Jumlah santri PPS Ula penerima PIP ➤ Jumlah santri PPS Wustho penerima PIP ➤ Jumlah santri PPS Ulya penerima PIP 	<p>13 Orang</p> <p>100 santri</p> <p>480 santri</p> <p>180 santri</p> <p>286 santri</p> <p>178 santri</p>	<p>39.000.000</p> <p>90.000.000</p> <p>528.000.000</p> <p>81.000.000</p> <p>214.500.000</p> <p>178.000.000</p>

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
3.	Peningkatan akses, mutu dan relevansi madrasah	Meningkatnya mutu siswa madrasah	➤ Siswa MI Penerima BOS	33.115 siswa	29.803.500.000
			➤ Siswa MTs penerima BOS	14.824 siswa	16.306.400.000
			➤ Siswa MA penerima BOS	2.738siswa	4.107.000.000
			➤ Jumlah siswa RA/BA penerima BOP	6.722 siswa	4.033.200.000
		Meningkatnya jaminan kualitas kelembagaan madrasah	Jumlah layanan dukungan manajemen	1 Layanan	5.000.000
4.	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan madrasah	Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah	➤Jumlah guru Non PNS penerima insentif	1.028 guru	3.084.000.000
			➤Jumlah guru Non PNS yang menerima tunjangan sertifikasi guru	738 Guru	19.062.000.000
			➤Jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi	843 Guru	30.114.957.000
5.	Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I	1 layanan	13.000.000
		Meningkatnya kualitas kinerja pegawai dan operasional perkantoran	➤ Jumlah layanan perkantoran pembayaran gaji dan tunjangan	1 Layanan	68.972.134.000
			➤ Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	490.008.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
E.	Program Bimbingan Masyarakat Kristen				
1.	Pengelolaan dan pembinaan pendidikan Agama kristen	Meningkatnya kualitas peserta didik dan pendidikan Agama Kristen tingkat dasar dan menengah Meningkatnya kualitas tenaga pendidik agama dan keagamaan Kristen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah siswa SMTK yang menerima KIP ➤ Jumlah siswa SMTK yang menerima BOS ➤ Jumlah guru PAK Non PNS penerima tunjangan profesi ➤ Jumlah guru PAK Non PNS penerima insentif 	9 Siswa 9 siswa 2 Orang 8 Orang	9.000.000 12.600.000 60.000.000 24.000.000
2.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Kristen	Jumlah Penyuluh Agama Kristen Non PNS Penerima Tunjangan	13 Orang	78.000.000
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah layanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan) ➤ Jumlah operasional perkantoran 	1 layanan 12 Bulan	132.486.000 24.600.000
4.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah guru PNS yang dibayarkan tunjangan profesinya ➤ Jumlah layanan operasional 	15 guru 12 bulan	637.244.000 19.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
F.	Program Bimbingan Masyarakat Katolik				
1.	Pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Katolik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah guru pendidikan Agama Katolik Non PNS tersertifikasi yang menerima tunjangan ➤ Jumlah kegiatan pembinaan guru agama Katolik tingkat dasar ➤ Jumlah KKG/MGMP Katolik yang menerima bantuan 	<p>2 orang</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 lokasi</p>	<p>36.000.000</p> <p>26.900.000</p> <p>20.000.000</p>
2.	Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Katolik	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan bergama katolik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah penyuluh Agama Katolik Non PNS yang menerima tunjangan 	6 Orang	42.000.000
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik	Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah layanan gaji ➤ Jumlah layanan perkantoran 	<p>1 layanan</p> <p>12 Bulan</p>	<p>129.396.000</p> <p>56.000.000</p>
4.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik	Terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan guru PNS	1 layanan	592.443.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
G.	Program Bimbingan Masyarakat Hindu				
1.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu	Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel serta tersedia aparatur pelayanan keagamaan yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ➤ Jumlah dokumen operasional dan pemeliharaan kantor yang tersedia 	1 layanan 12 bulan	253.681.000 6.000.000
H.	Program Bimbingan Masyarakat Budha				
1.	Pengelolaan dan pembinaan pendidikan Agama Budha	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik Agama Budha	Jumlah guru Non PNS penerima tunjangan profesi	2 Orang	73.344.000
2.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Budha	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perkantoran pendidikan Bimas Budha	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor 	1 layanan 12 bulan	531.468.000 18.000.000
I.	Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh				
1.	Pelayanan haji dalam ne	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terpenuhinya pelayanan dokumen dan perlengkapan jamaah haji ➤ Terpenuhinya dokumen layanan transportasi haji ➤ Terpenuhinya dokumen pendaftaran dan pembatalan haji reguler 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan dokumen dan perlengkapan jamaah haji Jumlah dokumen layanan transportasi haji ➤ Jumlah dokumen pendaftaran dan pembatalan haji reguler ➤ Jumlah petugas haji yang profesional 	1000 orang 1 dokumen 1 dokumen 15 orang	75.000.000 15.000.000 93.000.000 5.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.	Pembinaan haji	Terlaksananya rekrutmen petugas haji yang profesional	Jumlah petugas haji yang profesional	15 orang	74.250.000
		Terlaksananya bimbingan jamaah haji	Jumlah jamaah haji yang dibimbing	75 orang	75.000.000
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umroh	Tersedianya dukungan layanan manajemen dan operasional penyelenggaraan haji dan umroh	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah layanan dukungan manajemen ➤ Jumlah layanan sarana dan prasarana internal ➤ Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ➤ Jumlah kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor 	<ul style="list-style-type: none"> 1 layanan 1 layanan 1 layanan 12 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 25.000.000 20.000.000 675.000.000 149.200.000



Banyumas, Januari 2021
Kepala,

[Handwritten Signature]
Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag.
NIP. 196403221992031002

CAPAIAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama						
1.	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	➤ Jumlah dokumen layanan manajemen keuangan dan BMN	1 layanan	3.698.326.000	3.985.014.000	3.975.442.094	99.76 %
2.	Pembinaan Administrasi Umum	Terlaksananya layanan operasional dan pemeliharaan Kantor	1 layanan	811.164.000	981.164.000	981.043.395	99.99 %
B.	Program Kerukunan Umat Beragama						
1.	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	➤ Jumlah paket bantuan operasional Sekber FKUB	1 Lokasi	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %
C.	Program Bimas Islam						
	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	➤ Jumlah penghulu yang terbina	40 Orang	8.000.000	-	-	
		➤ Jumlah KUA yang memenuhi standar minimal	27 Lokasi	1.947.750.000	1.977.350.000	1.844.460.000	93.28 %
		➤ Jumlah keluarga sakinah yang terbina	1 Pasangan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
2.	Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf	➤Jumlah peserta bimbingan perkawinan pra nikah	400 Pasang	130.500.000	130.500.000	130.500.000	100 %
		➤Jumlah pengadaan sarana dan prasarana KUA	2 Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %
		➤Jumlah lembaga yang mendapat pembinaan manajemen ekonomi umat	15 Lembaga	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100 %
		➤Jumlah bantuan bantuan pengamanan aset wakaf (papanisasi harta benda wakaf)	1 paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100 %
		➤Jumlah lembaga wakaf yang menerima bantuan sertifikasi	1 Lokasi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100 %
3.	Pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam	➤Jumlah penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan	218 Orang	1.744.000.000	2.616.000.000	2.616.000.000	100 %
		➤Jumlah penyuluh Agama Islam yang berkualitas	50 Orang	53.000.000	40.000.000	40.000.000	100 %
		➤Jumlah kegiatan penyelenggaraan MTQ	2 Kegiatan	17.000.000	-	-	-
		➤Jumlah kegiatan pembinaan lembaga seni dan siaran keagamaan Islam	1 Kegiatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
4.	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.	Jumlah direktori Pustaka Islam	1 Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100 %
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	21.184.344.000	19.896.363.000	19.024.571.961	95.62
D.	Program Pendidikan Islam						
1.	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah dokumen penyelenggaraan UASBN PAI ➤ Jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi ➤ Jumlah Guru PAI PNS yang menerima TPG 	<p>1 Dokumen</p> <p>79 Guru</p> <p>472 Guru</p>	<p>2.500.000</p> <p>1.718.405.000</p> <p>21.435.570.000</p>	<p>740.000</p> <p>1.718.399.000</p> <p>18.630.707.000</p>	<p>0</p> <p>1.718.398.800</p> <p>18.630.706.100</p>	<p>0 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
2.	Peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan keagamaan Islam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Ustad Pendidikan Keagamaan Islam yang menerima intensif ➤ Jumlah santri Ula penerima BOS 	<p>13 Orang</p> <p>100 santri</p>	<p>39.000.000</p> <p>90.000.000</p>	<p>39.000.000</p> <p>80.000.000</p>	<p>39.000.000</p> <p>80.000.000</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
3.	Peningkatan akses, mutu dan relevansi madrasah	➤ Jumlah Santri Wustho penerima BOS	480 santri	528.000.000	480.000.000	480.000.000	100 %
		➤ Jumlah Madin, Pendidikan Al Qur'an dan Pontren penerima BOP	6 lembaga	-	60.000.000	60.000.000	100 %
		➤ Jumlah santri PPS Ula penerima PIP	180 santri	81.000.000	81.000.000	81.000.000	100 %
		➤ Jumlah santri PPS Wustho penerima PIP	286 santri	214.500.000	214.500.000	214.500.000	100 %
		➤ Jumlah santri PPS Ulya penerima PIP	178 santri	178.000.000	178.000.000	178.000.000	100 %
		➤ Siswa MI Penerima BOS	33.115 siswa	29.803.500.000	27.152.800.000	27.152.610.000	100 %
		➤ Siswa MTs penerima BOS	14.824 siswa	16.306.400.000	15.713.000.000	15.713.000.000	100 %
		➤ Siswa MA penerima BOS	2.738siswa	4.107.000.000	3.992.520.000	3.992.100.000	99.99 %
		➤ Jumlah siswa RA/BA penerima BOP	6.722 siswa	4.033.200.000	2.594.400.000	2.594.300.000	100 %
		➤ Jumlah layanan dukungan manajemen	1 Layanan	5.000.000	0	0	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
4.	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan madrasah	➤ Jumlah guru Non PNS penerima insentif	1.028 guru	3.084.000.000	3.084.000.000	3.084.000.000	100 %
		➤ Jumlah guru Non PNS yang menerima tunjangan sertifikasi guru	738 Guru	19.062.000.000	21.698.611.000	21.694.031.300	99.98 %
		➤ Jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi	843 Guru	30.114.957.000	31.285.024.000	31.285.023.100	100 %
		➤ Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I	1 layanan	13.000.000	0	0	-
5.	Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam	➤ Jumlah layanan perkantoran pembayaran gaji dan tunjangan	1 Layanan	68.972.134.000	68.676.641.000	68.674.224.635	100 %
		➤ Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	490.008.000	494.652.000	494.651.500	100 %
E.	Program Bimas Kristen						
1.	Pengelolaan dan pembinaan pendidikan Agama Kristen	➤ Jumlah siswa SMTK yang menerima KIP	9 Siswa	9.000.000	9.000.000	2.500.000	27.28 %
		➤ Jumlah siswa SMTK yang menerima BOS	9 siswa	12.600.000	3.500.000	3.500.000	100 %
		➤ Jumlah guru PAK Non PNS penerima tunjangan profesi	2 Orang	60.000.000	75.346.000	73.816.800	97.97 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		➤ Jumlah guru PAK Non PNS penerima Tunjangan fungsional	8 Orang	24.000.000	24.000.000	21.000.000	87.50 %
2.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	13 orang	78.000.000	78.000.000	78.000.000	100 %
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen	➤ Jumlah layanan perkantoran (Pembayaran gaji dan tunjangan)	1 layanan	132.486.000	132.486.000	114.377.539	86.33 %
		➤ Jumlah operasional perkantoran	12 Bulan	26.400.000	26.400.000	26.150.000	99.05 %
4.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Kristen	➤ Jumlah guru PNS yang dibayarkan tunjangan profesinya	15 guru	637.244.000	567.244.000	563.867.200	99.40 %
		➤ Jumlah layanan operasional	12 bulan	19.500.000	19.500.000	16.661.000	85.44 %
F.	Program Bimbingan Masyarakat Katolik						
1.	Pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik	➤ Jumlah guru pendidikan Agama Katolik Non PNS tersertifikasi yang menerima tunjangan	2 orang	36.000.000	36.000.000	14.999.992	41.67 %
		➤ Jumlah kegiatan pembinaan guru agama Katolik	1 kegiatan	26.900.000	26.900.000	26.600.000	98.88 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		➤ Jumlah KKG/MGMP Katolik yang menerima bantuan	1 Lokasi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100 %
2.	Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Katolik	Jumlah penyuluh Agama Katolik Non PNS yang menerima tunjangan	6 Orang	42.000.000	72.000.000	42.000.000	58.33 %
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik	➤ Jumlah layanan gaji	1 layanan	129.369.000	129.369.000	120.628.732	93.24 %
		➤ Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan	56.000.000	56.000.000	53.700.000	95.89 %
4.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan guru PNS	1 layanan	592.443.000	517.553.000	514.544.232	99.42 %
G.	Program Bimbingan Masyarakat Hindu						
1.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu	➤ Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	1 layanan	253.681.000	228.373.000	227.124.325	99.45 %
		➤ Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor yang tersedia	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
H.	Program Bimbingan Masyarakat Budha						
1.	Pengelolaan dan pembinaan pendidikan Agama Budha	Jumlah guru Non PNS penerima tunjangan profesi	2 Orang	73.344.000	73.344.000	71.775.900	97.86 %
2.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Budha	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	1 layanan	531.468.000	559.259.000	556.069.059	99.43 %
		Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor	12 bulan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100 %
I.	Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh						
1.	Pelayanan haji dalam negeri	➤ Jumlah layanan dokumen dan perlengkapan jamaah haji	1000 orang	75.000.000	45.000.000	44.995.750	99.99 %
		➤ Jumlah dokumen layanan transportasi jamaah haji	1 dokumen	15.000.000	100.000	-	0 %
		➤ Jumlah dokumen layanan pendaftaran dan pembatalan haji reguler	1 dokumen	93.000.000	43.000.000	42.850.000	99.65 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
2.	Pembinaan haji	➤ Jumlah petugas haji yang profesional	15 orang	74.250.000	12.500.000	12.500.000	100 %
		➤ Jumlah jamaah haji yang dibimbing	75 orang	75.000.000	54.900.000	54.825.000	99.86 %
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umroh	➤ Jumlah layanan dukungan manajemen	1 layanan	25.000.000	56.500.000	56.400.000	96.28 %
		➤ Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	1 layanan	20.000.000	51.750.000	51.750.000	100 %
		➤ Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	675.000.000	687.599.000	687.578.411	100 %
		➤ Jumlah kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	12 bulan	149.200.000	189.200.000	188.118.807	99.43 %



Banyumas, Januari 2021
Kepala,

Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag.
NIP. 196403221992031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akhsin Aedi**
Jabatan : **Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Musta'in Ahmad**
Jabatan : **Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.



Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua


MUSTA'IN AHMAD

Purwokerto, Januari 2021
Pihak Pertama


AKHSIN AEDI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah peniar agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	84 85% 75 Orang 25 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus Pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	100 % 60 Orang 2 Kelurahan
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masya rakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	550 Lembaga/ Orang 2 Keg
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100 %
5	Meningkatnya kualitas Pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	77 % 2 Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	60 % 68 %

		3. Jumlah Imam besar yang ditingkatkan mutunya	14 Orang
		4. Jumlah Rumah Ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	18 Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	200 Kegiatan/ Konten
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase siswa di madrasah /sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 4. Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama 5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama 6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama 7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama 8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama 9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an 	<p>100%</p> <p>100%</p>
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	2 Lokasi

12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	14 Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparani Pesparawi, MTQ, STQ, FASI, Ustawa dll)	5 Event
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang dibina 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	3 Lokasi 0 Lokasi
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi 4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	6 Paket 3000 Buah 20 % 200 Kegiatan 50 Kegiatan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	0 KUA 2 KUA 3.972 Orang 411 Anak 15.000 Buku/Kartu
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah / kristiani / bahagia / sukinah / hitta sukhaya	200 Keluarga

18	Meningkatnya kualitas Pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	75 %
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	70 % 1 %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transport tasi jemaah haji yang tepat waktu	100 %
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100 %
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100 %
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	55 % 80 %
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	100 % 40 Akta 92 %
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2. Persentase pendidikan diniyah / muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum 3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program ketrampilan /kejuruan;	100 % 100 % 100 % 1 Madrasah 1 Madrasah

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru di madrasah /sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah keagamaan; 3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan; 4. Persentase siswa yang mengikuti assesmen. 	<p>100 %</p> <p>5 Kegiatan</p> <p>9 Kegiatan</p> <p>30 %</p>
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah / muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran 	<p>84 %</p> <p>40 %</p>
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RA /Pratama Widya Pasraman /Taman Seminari /Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana 2. Persentase MI / Ula / SDTK / Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 3. Persentase MTs/Wustha /SMPTK / Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 4. Persentase MA / Ulya / SMTK / SMAK / Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 5. Persentase PDF/ Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana 6. Persentase Madrasah / Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya 7. Persentase Sekolah Minggu Buddha / Dhammasekha Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana 	<p>66 %</p> <p>66 %</p> <p>76 %</p> <p>76 %</p> <p>76 %</p> <p>0 %</p> <p>45 %</p>

29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan /PDF Muadalah 3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan 4. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah; 	<p>41.000 Siswa</p> <p>2.700 siswa</p> <p>7 %</p> <p>10 %</p>
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang meng ikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren 	<p>20 %</p> <p>30 %</p>
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman / Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	7.000 Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi 2. Persentase tenaga kependidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidik an diniyah / muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi 	<p>0 %</p> <p>80 %</p> <p>70 %</p> <p>0 %</p> <p>85 %</p>
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 	<p>27 %</p> <p>27 %</p>

34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah /Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2 	<p>10 %</p> <p>19 %</p> <p>70 %</p> <p>0 %</p>
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 	<p>0 %</p> <p>0 %</p>
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah/ sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	17 Madrasah
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 	<p>100 %</p> <p>3 %</p>
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase MTs / MA / SMPTK / SMTK / SMAK / Pesantren / Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman 3. Persentase madrasah / sekolah keagamaan yang ramah anak 	<p>100 %</p> <p>50 %</p> <p>85 %</p>
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah / Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina 	<p>11 Organisasi Ekstra Kurikuler</p> <p>11 Gugus</p>

40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan 	<p>80 %</p> <p>88 %</p> <p>10 Kegiatan</p>
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan 4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu 	<p>84 %</p> <p>79 %</p> <p>86 %</p> <p>55 %</p> <p>60 %</p> <p>78 %</p>
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu; 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama 	<p>95 Dokumen</p> <p>86 %</p> <p>99 %</p> <p>88 %</p>
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Persentase tanah yang bersertifikat 3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN 	<p>83 %</p> <p>97 %</p> <p>83 %</p>

44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan organisasi /kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti 	<p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p>
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja 	<p>84 %</p> <p>2 Satker</p> <p>10 Orang</p>
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindak lanjuti 	<p>86 %</p> <p>68 %</p> <p>69 %</p>
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti 	<p>84 %</p> <p>76 %</p>
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	84 %
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Persentase menurunnya pelanggaran 5. Persentase menurunnya sengketa dan sengketa banding 	<p>84 %</p> <p>86 %</p> <p>90 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p>

50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	80 %
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	86 % 86 %
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	1 sistem 83 %
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 140.855.425.000,-
2.	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Rp. 5.451.823.000,-
3.	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 294.346.000,-
4.	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 5.388.600.000,-
Jumlah seluruh		Rp. 151.990.194.000,-

Pihak Kedua



MUSTA'IN AHMAD



Purwokerto, Januari 2021

Pihak Pertama



AKHSIN AEDI

